LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2021

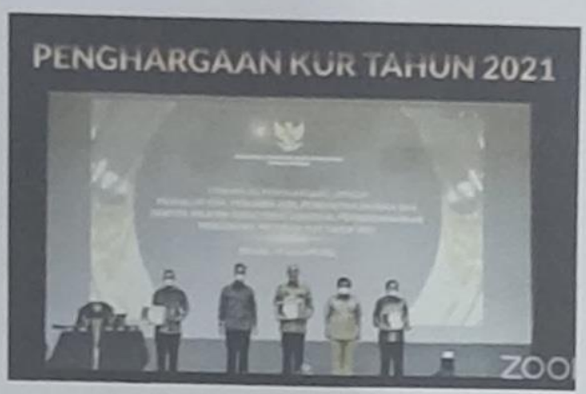

Jateng gayeng

BIRO PEREKONOMIAN SETDA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN COVER i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR GAMBAR iv
KATA PENGANTAR v

1. BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang 1
1.2. Struktur Organisasi 1
1.2.1. Tata Kerja Biro Perekonomian 2
1.2.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 2
1.3. Aspek Strategis dan Permasalahan Utama 3
1.4. Landasan Hukum 4
1.5. Sistematika 5

2. BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 6
2.2 Perencanaan Kinerja 6
2.3 Perjanjian Kinerja 8

3. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi..... 9
3.2 Analisis Capaian Kinerja..... 10
3.2.1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 10
3.3 Realisasi Anggaran 17

4. BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 18

4.2 Rekomendasi 19

LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja .....

RKT .....

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1	:	Tujuan dan Sasaran.....	6
Tabel 2.2	:	Rencana Kinerja	7
Tabel 3.2.1	:	Perbandingan Antara Target dan Kinerja	10
Tabel 3.2.2	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya ...	11
Tabel 3.2.3	:	Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan RPJMD	12
Tabel 3.2.4	:	Analisis Keberhasilan Dengan Tingkat > 100 %	12
Tabel 3.2.5	:	Analisis Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.....	13
Tabel 3.2.6	:	Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan dan Kegagalan	13
Tabel 3.3	:	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	17

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 : Struktur Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah 22
Gambar 1.2 : Penghargaan Program KUR Terbaik I Tahun 2021 23
Gambar 1.3 : Penghargaan TPKAD Program Pemberdayaan UMKM Terbaik 24

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah 2021 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, bahwa Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Disisi lain laporan ini juga disusun untuk memberikan gambaran tentang tingkat keberhasilan kinerja beserta permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencanan Kerja Tahunan 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dan Rencana Strategis 2018 – 2023 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 yang telah ditetapkan.

Semarang, Pebruari 2022

Kepala Biro Perekonomian
Setda Provinsi Jawa Tengah

EDDY S BRAMIYANTO, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19660611 198602 1 001

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 54 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah.

Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Tahun 2021 ini adalah :

1. Memeberikan informasikinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Sturktur Organisasi

Susunan organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

a. Kepala Biro Perekonomian;

b. Kepala Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
   1) Kepala Sub Bagian Perindustrian dan Perdagangan;
   2) Kepala Sub Bagian Koperasi dan UKM;
   3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro.

c. Kepala Bagian Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata
   1) Kepala Sub Bagian, Penanaman Modal dan Pariwisata;
   2) Kepala Sub Bagian Perhubungan.

d.Kepala Bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

1) Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Keuangan;
2) Kepala Sub Bagian BUMD Bidang Jasa dan Produksi.

Struktur Organisasi Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah sebagaimana terlampir.

1. Tata Kerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Biro yang membawahi 3 (tiga) Kepala Bagian dengan 7 (tujuh) Kepala Sub Bagian sedangkan jumlah seluruh pegawai Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah ada 34 dengan klasifikasi kepegawaian, sebagai berikut :

a.	Eselon II	:	1 orang
b.	Eselon III	:	3 orang
c.	Eselon IV	:	7 orang
d.	Staf	:	23 orang
a.	**Jumlah total**	:	**34 orang**

2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah berada di bawahnya Asisten Ekonomi Dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah yang membantu tugas Asisten Ekonomi dan Pembangunan dalam pengoordinasian penyusunan dan analisis kebijakan Daerah, pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Gubemur di bidang Ekonomi Dan Pembangunan, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN.

Sedangkan Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah itu sendiri, terdiri atas:

a. Bagian Perindustrian, Perdagangandan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah;
b. Bagian Badan Usaha Milik Daerah; dan
c. Bagian Perhubungan,Penanaman Modal Dan Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 70 Tahun 2018 tentang Ornanisasi dan Tata Kelola Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Pada pasal 79, Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubugan, Penanaman Modal dan Pariwisata.

Sedangkan pada pasal 80, Biro Perekonomian mempunyai fungsi :

a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat;
c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
d. Pelayanan administrasi dan pembinan sumber daya ASN;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

Dalam pelaksanaan tugas pengkoordinasian penyusunan dan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, terdapat aspek strategis yang perlu diperhatikan dengan mempertimbangkan resiko yang telah teridentifikasi pada Rencana Tindak Pengendalian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (RTP - SPIP) Tahun 2021.

Pada tahun 2021 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai bebarapa permasalahan utama yang perlu dihadapai. Beberapa permasalahan tersebut, sebagai berikut :

1. Masih kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mendorong peningkatan ekspor Jawa Tengah yang bersumber dari hasil pengolahan - pengolahan sumber daya alam, terutama sektor pertanian, kelautan, kehutanan, peternakan serta kearifan lokal Jawa Tengah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan tugas, peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Tengah dalam menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil sesuai target yang ditetapkan sehingga dapat mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan mampu memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
3. Harga kebutuhan pokok masyarakat (kepokmas) di Jawa Tengah masih berfluktuasi dan belum stabil;
4. Perlunya strategi dalam rangka pemulihan perekonomian di Jawa Tengah akibat dampak pandemi Covid-19;
5. Masih perlunya peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah;
6. Laba dan deviden BUMD yang masih perlu untuk ditingkatkan sebagai salah satu penyumbang PAD Jawa Tengah;
7. Belum optimalnya sinergi dan penggunaan teknologi informasi pada BUMD dalam memenangkan persaingan era disruption;
8. Belum berkembangnya dan belum optimalnya pemberdayaan ekonomi kreatif dalam menghadapi tenaga kerja milenial yang memerlukan penyaluran kompetensinya agar dapat terserap untuk berkreasi dan lebih produktif.

1.4 Landasan Hukum

1. Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. RPJMD Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 - 2023;
3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021;

4. Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023;
6. Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomro 23 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021.

1.5 Sistematika

1. Bab I : Pendahuluan
   Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja
2. Bab II : Perencanaan Kinerja
   Teknis Pelaporan Kinerja
3. Bab III : Akuntabilitas Kinerja
   Teknis atas Pelaksanaan Reviu Atas laporan Kinerja
4. Bab IV : Penutup
5. Lampiran – Lampiran

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana Starategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun dan disusun sebagai penjabaran atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) sehingga Renstra yang disusun memuat program dan kegiatan tahun 2018 – 2023 sesuai RPJMD Jawa Tengah dimaksud yang sesuai dengan Visi Gubernur Jawa Tengah **"MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI" TETEP *MBOTEN KORUPSI, MBOTEN NGAPUSI*** dan Misi Gubernur Jawa Tengah :

1. Membangun masyarakat jawa tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Adapun tujuan dan sasaran Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealiasi	90	93	90	93	94

	Daerah							
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	85	70	90	93	95
			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	100	100	100	100	100

2.2. Perencanaan Kinerja

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk tahun 2021 memiliki Tujuan, Sasaran dan Program yang telah di tepapkan dalam Renstra dan dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.2
Rencana Kinerja

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Meningkatkan Efektivitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Presentase Kebijakan yang Efektif	%	80
		Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	90
			Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	90

			Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	100

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja kegiatan tahunan, sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan. Didalamnya ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran. Tercapainya sasaran yang ditargetkan akan mempercepat terwujudnya Tugas dan Fungsi Biro Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah. Dalam Perjanjian Kinerja (PK) yang telah disepakati antara kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dengan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 dapat dilihat pada Perjanjian Kinerja (PK) sebagaiman terlampir.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja dapat diartikan sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam pencapian visi dan melaksanakan misi organisasi kepada pihak - pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan ditetapkan, pengukuran dimaksud itu merupakan suatu hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan dan sasaran.

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran dipergunakan interval atau skala nilai sebagai berikut :

NO	KATE GORI	SKOR (%)
1	Sangat Baik	>91
2	Baik	76 – 90,99
3	Cukup	66 – 75,99
4	Kurang	51 – 65,99
5	Sangat Kurang	≤ 50,99

3.2. Analis Capaian Kinerja

Hingga akhir tahun 2021, Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dalam aplikasi *e-controlling* secara periodik telah melaporkan hasil capaian kinerja setiap bulan dalam 1 (satu) tahun. Capaian kinerja fisik untuk tahun 2021 sesuai target dan tercapai 100 % sedangkan realisasi keuangan dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 3.2.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Deviasi	Suimber Data
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatjan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	100	125	-	
2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90,91	101,01	-	
3	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian	90	90	100	-	
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi	100	80	80	(20)	

Tabel 3.2.2
Perbandingan realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya

No	Tujuan /Sasaran	Indikator Kinerja	2019			2020			2021		
			Target (%)	Real (%)	Cap (%)	Target (%)	Real (%)	Cap (%)	Target (%)	Real (%)	Cap (%)
1	Meningkatjan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	93,02	116,28	80	86,08	107,6	82	92,05	112,26
2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi	80	83,05	103,81	80	81,82	102,28	90	90,91	101,01
3	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian	85	87,5	100,94	70	70	100	90	90	100
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi	100	90	90	80	40	50	100	80	80

Tabel 3.2.3
Perbandingan realisasi kinerja dengan RPJMD

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2021	Target Akhir 2023	% Capaian	Tingkat Kemajuan
1	Meningkatjan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	80	100	100	Sangat Baik
2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90	100	Sangat Baik
3	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian	90	95	105,56	Sangat Baik
		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi	100	100	100	Sangat Baik

Tabel 3.2.4
Analisis keberhasilan dengan tingkat lebih dari 100 %

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian	Analisis Keberhasilan	Solusi yang Dilakukan
1	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi	90	90,91	101,01	Optimalisasi SDM yang tersedia untuk melakukan pembinaan dan monitoring kinerja BUMD di Jawa Tengah	-
						Melakukan koordinasi secara intensif ke BUMD	
						Pasca dilaksanakan konsulidasi PD BKK menjadi PT BKK Jateng mengalami kondisi trend yang positif dari tahun ke tahun maupun BUMD	

Tabel 3.2.5
Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja (%)			Anggaran (Rp)			Tingkat Efesiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	Capaian	
1	Meningkatnya sinergitas kebijakan daerah	100	100	100	103.558.000	103.228.484	99,68	(0,32)
2	Meningkatnya efektifitas dan akuntabilitas penyelenggaraan PD	100	100	100	2.481.272.000	2.174.572.011	87,64	(12,36)
					2.584.830.000	2.277.800.495	88,12	(11,88)

Tabel 3.2.6
Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan dan kegagalan

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	% capaian	Menunjang /tidak
1	Meningkatjan Efektifitas Manajemen Pemerintahan Daerah	Persentase Kebijakan yang Efektif	125	Penunjang urusan Pemerintahan Daerah/Administrasi Umum	Jumlah bulan terpenuhinya pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah	99,63	Menunjang
2	Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah	Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi	101,01		Jumlah bulan terpenuhinya Pelayanan Jasa Surat Menyurat dan Kearsipan	100	
3	Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian	100		Jumlah bulan terpenuhinya Penyediaan Makan Minum Rapat rapat	100	

		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi	80	Program Perekonomian Pembangunan	Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	80	
					Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	93,75	
					Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	89,47	
					Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	93,33	
					Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	92,31	
					Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	93,52	
					Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan,	100	

					Penanaman Modal dan Pariwisata yang yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya		
					Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	100	
				Pengelolaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Jasa dan Produksi	2 dok	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dengan BUMD bidang Keuangan	1 dok	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang perhubungan	1 dok	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Penanaman Modal dan Pariwisata	2 dok	
					Jumlah laporan hasil koordinasi dengan perangkat daerah bidang Perindustrian dan Perdagangan	1 dok	
					jumlah laporan monitoring bidang Jasa dan Produksi	3 dok	
					jumlah laporan monitoring bidang Keuangan	4 dok	
					jumlah laporan monitoring bidang Koperasi, LKM dan UKM	1 dok	

					jumlah laporan monitoring bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 dok	
					jumlah laporan monitoring bidang perhubungan	2 dok	
					jumlah laporan monitoring Pelaksanaan DBHCHT	2 dok	
					Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Jasa dan Produksi	2 dok	
					Jumlah rumusan Ringkas Kebijakan (Policy Brief) bidang Keuangan	3 dok	
					Jumlah rumusan ringkas kebijakan (policy Brief) bidang koperasi, LKM dan UKM	2 dok	
					Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang penanaman modal dan Pariwisata	2 dok	
					Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang perhubungan	1 dok	
					Jumlah rumusan Ringkas kebijakan (Policy Brief) bidang Perindustrian dan Perdagangan	2 dok	

3.3. Realisasi anggaran

Perkembangan pelaksanaan belanja operasi dan belanja modal APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel 3.3
Tabel Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
1	Program Penunjangurusan Pemerintahan Daerah	**103.558.000**	**103.228.484**	**99,68**
	Administrasi Umum	103.558.000	103.228.484	99,68
2	Program Perekonomian Pembangunan	**2.481.272.000**	**2.174.572.011**	**87,64**
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	156.795.000	154.496.915	98,53
	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	1.780.142.000	1.558.336.683	87,54
	Jumlah	**2.584.830.000**	**2.277.800.495**	**88,12**

BAB IV
P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah, pelayanan administratif dan pembinaan sumber daya ASN di bidang Perindustrian ,Perdagangan, Koperasi dan UKM dan Badan Usaha Milik Daerah serta Perhubugan, Penanaman Modal dan Pariwisata dan berfungsi untuk memberikan pelayanan di bidang pemerintahan pada masyarakat.

Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, untuk realisasi keuangan pada tahun 2021 mengalami deviasi sebesar -11,88 % dikarenakan adanya Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Tengah tentang PPKM level 3 dan 4 serta adanya revocusing anggaran sehingga kegiatan yang seharusnya dilakukan dengan kunjungan lapngan hanya dilakukan secara daring akan tetapi untuk kinerja tercapai 100 %, maka dapat dikatakan bahwa kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua sasaran Meningkatnya Sinergitas Kebijakan Daerah dengan indicator kinerja Persentase rekomendasi Bidang Perekonomian yang terealisasi dari target 90 % tercapai 90,91 % dan Meningkatnya Efektifitas dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan indicator kinerja Persentase Keberhasilan Pelaksanakan Kebijakan Startegis Bidang Perekonomian dari target 90 % tercapai 90 % dan Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang Dievaluasi dari target 100 % hanya terlaksana 80 % sehingga apabila di

rata – rata capaiannya 86,97 % maka telah ditetapkan dicapai dengan ketegori **Baik.**

Beberapa kinerja yang mengalami ketidaksesuaian dengan target dikarenakan tidak tercapainya beberapa kegiatan dengan adanya aturan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sehingga banyak acara rakor dan kegiatan lain yang dialihkan/ditunda bahkan di tiadakan sehingga penggunaan Anggaran tahun 2021 pada Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah telah melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 307.029.505,- (11,88 %) dari angaran yang disediakan.

4.2. Rekomendasi

Beberapa langkah atau strategi yang dilaksanakan dalam perbaikan kinerja Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah untuk kedepannya sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk Tim Koordinasi Peningkatan dan Percepatan Ekspor Pengolahan Sumber Daya Alam Provinsi Jawa Tengah yang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya peningkatan dan percepatan ekspor pengolahan sumber daya alam Jawa Tengah dengan seluruh instansi terkait, termasuk mengidentifikasi permasalahan/hambatan dan upaya mencari solusi atas permasalahan/hambatan yang dihadapi;
2. Adanya kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Republik Indonesia melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja. Ruang lingkup Nota Kesepakatan meliputi asistensi, sosialisasi dan advokasi terkait persaingan usaha, tukar menukar data dan informasi persaingan usaha, koordinasi pengawasan pelaksanaan kemitraan, dan dukungan terhadap upaya pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha. Melalui Nota Kesepakatan dan Rencana Kerja ini

diharapkan akan meningkatkan pemahaman dan kesadaran atas prinsip persaingan usaha yang sehat, prinsip kemitraan, dan etika bisnis yang sehat pada pemangku kebijakan dilingkungan Pemprov Jawa Tengah, para stakeholder dan seluruh masyarakat Jawa Tengah secara umum;

3. Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah;
4. Lebih mengintensifkan kegiatan-kegiatan untuk mengidentifikasi dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam rangka pemulihan ekonomi di Jawa Tengah. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat diharapkan seluruh pemangku kebijakan dibidang Ekonomi di seluruh Jawa Tengah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) memiliki data, informasi, pemahaman, kesadaran dan sudut pandang yang sama terhadap kondisi ekonomi yang sedang terjadi di , sehingga dalam merumuskan kebijakan dibidang ekonomi maupun bidang lain yang terkait dapat tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat manfaat;
5. Peningkatan pemberdayaan koperasi dan UMKM agar dapat berperan maksimal dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, termasuk pemanfaatan fasilitas pembiayaan/kredit untuk mendukung pengembangan UMKM;
6. Optimalisasi bisnis yang ada antara lain peningkatan pangsa pasar, diversifikasi bisnis, pengembangan SDM, optimalisasi aset idle, penguatan IT serta digital marketing;
7. Penguatan dukungan IT terhadap pengembangan produk berbasis digital, peningkatan kompetensi SDM dalam penggunaan IT serta dukungan teknologi terhadap operasional usaha;
8. Perlunya mendorong optimalisasi kinerja ekonomi kreatif di Jawa Tengah dengan pembentukan Komite Ekonomi Kreatif dan berkordinasi dengan dinas teknis untuk membantu fasilitasi akses permodalan pelaku ekonomi kreatif serta mengikutsertakan industri kreatif pada event-event pameran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah semoga dapat menjadi bahan pertimbangan / evaluasi untuk kegiatan / kinerja yang akan datang.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi

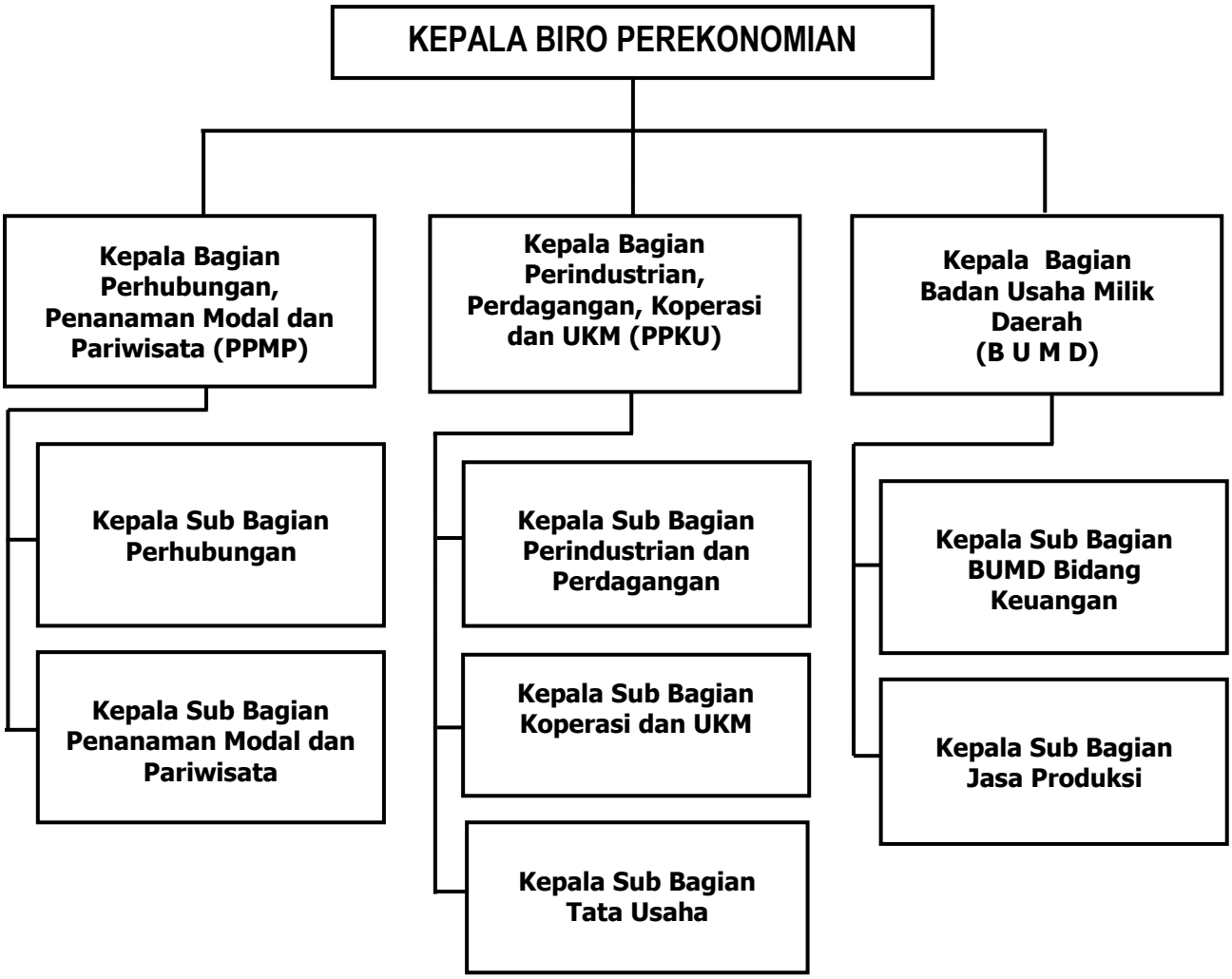

Gambar 1.2

Penghargaan TPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk
Program Pemberdayaan UMKM Terbaik Tahun 2021

Gambar 1.3

Piagam Penghargaan sebagai Pemerintah Provinsi Pendukung
Program KUR Terbaik I Tahun 2021